ISSN: 2614-6754 (print)
ISSN: 2614-3097(online)

Halaman 42932-42939
Volume 8 Nomor 3 Tahun 2024

Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara

M.F. Mayolanda Hutauruk
Akuntansi, Universitas Negeri Medan
e-mail: mayolandahutauruk1811@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2020-2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020-2022. Populasi penelitian mencakup 33 kabupaten/kota, dengan pemilihan sampel menggunakan metode *total sampling,* sehingga total sampel berjumlah 99. Dalam menganalisis data, peneliti memanfaatkan SPSS versi 29. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kab/kota di Sumatera Utara tahun 2020-2022 sedangkan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kab/kota di Sumatera Utara tahun 2020-2022.

Kata kunci: *Kinerja Keuangan, PAD, Belanja Modal*

Abstract

The aim of this research is to determine the effect of Local Own Revenue (PAD) and Capital Expenditure on the Financial Performance of Regional Governments in the Districts/Cities of North Sumatra Province from 2020 to 2022. This study employs a quantitative method using secondary data in the form of the Budget Realization Report (LRA) from the District/City Governments in North Sumatra Province during the 2020-2022 period. The research population includes 33 districts/cities, with a total sampling method used, resulting in a total sample of 99. In analyzing the data, the researcher utilized SPSS version 29. The results indicate that PAD has a significant positive effect on the financial performance of regional governments in the districts/cities of North Sumatra from 2020 to 2022, while capital expenditure has a negative effect on the financial performance of regional governments in the same period.

Keywords : *Financial Performance, PAD, Capital Expenditure*

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah, sebagai perwakilan pemerintah pusat di setiap wilayah, memainkan peran penting, terutama dalam upaya menyejahterakan rakyat. Hal ini karena pemerintah daerah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menangani masalah lokal serta memaksimalkan potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat melalui UU No 32 tahun 2024. Inilah yang disebut dengan otonomi daerah.

Salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi adalah pengelolaan keuangan daerah. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang dapat dimiliki oleh daerah sehubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi lokal dalam pembangunan daerah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan maupun pengelolaan keuangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan kemampuan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah serta membiayai

pembangunan dan layanan sosial. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berfungsi sebagai tolok ukur dalam pembangunan daerah dan memastikan transparansi.

Setiap daerah memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan guna mendukung kelancaran perekonomian dan pemerintahan. Pendapatan ini dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah melalui pungutan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan sumber penerimaan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, serta sumber PAD yang sah lainnya. Peningkatan PAD akan berdampak pada peningkatan total pendapatan daerah. Pertumbuhan pendapatan daerah yang terus meningkat menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin membaik. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber keuangan, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk pembangunan dan pemenuhan kebutuhan daerah. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), semakin kecil ketergantungan pada pemerintah pusat.

Menurut Halim (2014), Belanja Modal adalah jenis belanja yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara nyata. Infrastruktur yang dibangun melalui belanja modal akan mempercepat perputaran ekonomi, karena distribusi barang dan jasa menjadi lebih efisien dan efektif. Namun, realisasi belanja modal di akhir tahun sering kali tidak mencapai target yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebaliknya, realisasi belanja pegawai sering kali melebihi anggaran yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pada akhir tahun anggaran, pemerintah daerah cenderung lebih memprioritaskan peningkatan belanja pegawai dibandingkan mencapai target belanja modal. Peningkatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur diyakini akan meningkatkan sumber keuangan pemerintah daerah dalam beberapa tahun mendatang. Jika pendapatan daerah terus bertumbuh, hal ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif. Pemerintah daerah diharapkan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada belanja modal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Menurut Saragih (2020), kinerja adalah pencapaian yang telah direncanakan, baik oleh individu maupun organisasi. Jika pencapaian sesuai dengan rencana, maka kinerja tersebut dianggap baik. Apabila pencapaian melampaui apa yang direncanakan, kinerjanya dianggap sangat baik. Sebaliknya, jika pencapaian tidak mencapai apa yang direncanakan, kinerjanya dianggap buruk. Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat digunakan sebagai evaluasi dan alat pemulihan kinerja dengan membandingkan skema dan pelaksanaannya. Selain itu, pengukuran ini juga dapat menjadi tolok ukur untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah pada periode mendatang.

Kinerja Keuangan merupakan ukuran dari pengelolaan keuangan organisasi dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban. Kinerja keuangan gambaran mengenai kondisi keuangan organisasi pada suatu periode tertentu yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas perusahaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah.

Halim (2014) menyatakan bahwa kinerja keuangan dapat diukur melalui rasio keuangan yang dihitung berdasarkan data keuangan daerah, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rasio-rasio tersebut meliputi rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian, keserasian modal, dan pertumbuhan pendapatan. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan pemerintah daerah diukur menggunakan rasio efisiensi, yang berarti penggunaan dana masyarakat menghasilkan output maksimal.

Efisiensi keuangan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh perbandingan antara belanja daerah dan realisasi pendapatan. Kinerja keuangan daerah dianggap efisien jika rasio yang dicapai kurang dari 1 atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi, semakin baik kinerja keuangan daerah. Tujuan dari pengukuran tersebut untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan

akuntabilitas pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah di tuntut mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Adapun rumus rasio efesiensi kinerja keuangan adalah sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \text{X } 100\%$$

Berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, terdapat sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Utara yang menunjukkan kinerja keuangan tidak efisien, dengan rasio di atas 100%. Kabupaten Batu Bara mencatatkan kinerja tidak efisien selama tiga tahun berturut-turut (2020-2022), menunjukkan pengeluaran yang terus melebihi pendapatan. Kabupaten Asahan menunjukkan ketidak efisiensian pada tahun 2020 dan 2021, namun mengalami peningkatan di tahun 2022. Kabupaten Dairi tidak efisien pada tahun 2020, meskipun mampu menunjukkan perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Kabupaten Humbang Hasundutan juga mencatatkan ketidak efisiensian selama tiga tahun, dengan rasio yang menunjukkan pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan. Kabupaten Karo terus mengalami ketidak efisiensian pada ketiga tahun tersebut, dan Kabupaten Labuhan Batu menunjukkan kinerja tidak efisien pada tahun 2020 dan 2022, sementara tahun 2021 berada pada kondisi efisien. Selain itu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Tapanuli Utara juga tidak efisien di tahun tertentu, menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketidak efisiensian ini mencerminkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan anggaran dan upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah agar dapat mencapai efisiensi yang lebih baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Digdowiseiso et al. (2021) dan Ika Novita Ardelia (2022) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, yang berarti pendapatan daerah yang tinggi dapat meningkatkan pelayanan publik dan membuat daerah lebih mandiri dari pemerintah pusat, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja keuangan daerah. Namun, Nova Febrianto (2018) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan.

Ratnasari & Meirini (2022) menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, artinya belanja modal yang dianggarkan dengan baik dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memperbaiki posisi keuangan pemerintah daerah. Namun Ardelia (2022) dan Padang & Padang (2023) memiliki kesimpulan yang berbeda. Hal ini menjelaskan bahwa Belanja Modal yang dialokasikan pemerintah belum mampu menarik motivasi publik untuk berkontribusi dalam pembangunan.

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat ketidakonsistenan dalam hasil penelitian, yang menyebabkan perbedaan hasil dalam studi mereka. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut di bidang ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kab/kota di provinsi Sumatera Utara tahun 2020-2022.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan memanfaatkan data sekunder. Data yang dianalisis berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020-2022, yang diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id). Populasi dalam penelitian mencakup Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Sumatera Utara periode 2020-2022. Penelitian ini mengambil populasi dari 33 Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Utara dalam periode waktu tahun 2020 hingga 2022. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *total sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Pengambilan sampel dengan menggunakan sampel jenuh dimana semua populasi menjadi sampel yaitu berjumlah 99 sampel. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS versi 29 dengan melalui beberapa tahapan, yaitu: 1) Analisis Statistik Deskriptif, 2) Uji Asumsi Klasik, dan 3) Analisis Regresi Linier Berganda

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang variabel-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif menyajikan deskripsi data berdasarkan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, minimum, jumlah (sum), rentang (range), kurtosis, dan skewness (Pratiwi, 2018:68). Ukuran statistik deskriptif yang dianalisis oleh peneliti mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Nilai minimum menunjukkan angka terkecil dalam data, sedangkan nilai maksimum menunjukkan angka terbesar yang berbeda dari rata-rata. Standar deviasi mengukur tingkat variasi data terhadap nilai rata-rata. Tabel berikut adalah statistik deskriptif dari variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal dan variabel dependen yaitu kinerja keuangan.

Tabel 1. Analisis Deskriptif

	Mean	Std. Deviation	N
KK	100,1479	5,27694	99
PAD	168105576382,5951	344648192517,26530	99
BM	200908072410,0748	178088002460,35074	99

Sumber : Data hasil perhitangan SPSS versi 29

Tabel ini menunjukkan bahwa penelitian melibatkan 99 sampel (N) yang dianalisis. Data yang diambil berasal dari periode 2020-2022. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1) dan Belanja Modal (X2), sedangkan variabel dependen adalah kinerja keuangan (Y). Untuk variabel kinerja keuangan, rata-rata (*mean*) dari 99 sampel adalah 100,1479, dengan standar deviasi sebesar 5,27694. Artinya, nilai kinerja keuangan bervariasi sekitar 5,28 dari nilai rata-ratanya. Sementara itu, untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), rata-rata nilai yang dihasilkan adalah 168.105.576.382,5951 dengan standar deviasi yang cukup besar, yaitu 3.344.648.192.517,26530, menunjukkan adanya variasi yang signifikan di antara nilai-nilai PAD yang ada. Adapun variabel Belanja Modal memiliki nilai rata-rata sebesar 200.908.072.410,0748 dengan standar deviasi sebesar 178.088.002.460,35074, yang juga menunjukkan tingkat variasi yang cukup besar di antara nilai-nilai belanja modal tersebut.

Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik pada dasarnya merupakan salah satu uji yang digunakan untuk persyaratan statistik. Hal ini harus dipenuhi hanya pada analisis regresi linier berganda, dan tidak pada regresi linier sederhana. Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil regresi yang diperoleh valid, dapat dipertanggungjawabkan, dan bebas dari bias. Uji asumsi klasik dapat dilakukan dengan Langkah-langkah: Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Tabel 2. Uji Normalitas

			Unstandardized Residual
N			99
Normal Parameters[a,b]	Mean		,0000000
	Std. Deviation		4,68539330
Most Extreme Differences	Absolute		,082
	Positive		,082
	Negative		-,071
Test Statistic			,082
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			,098
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[d]	Sig.		,101
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,093
		Upper	,109

Bound
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: Data Hasil Perhitungan SPSS versi 29

Uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* digunakan untuk menguji apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Berdasarkan ketentuan, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data dianggap terdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, data dianggap tidak terdistribusi normal (Ghozali, 2017). Dalam penelitian ini, hasil uji normalitas menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig 2-tailed) adalah 0,109. Karena nilai ini lebih besar dari 0,05 (0,109 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data residual dari uji tersebut terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Model		Unst Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	97,227	,793		122,559	<,001		
	PAD	-9,878E-12	,000	-,645	-4,248	<,001	,356	2,808
	BM	2,280E-11	,000	,770	5,067	<,001	,356	2,808

a. Dependent Variable: KK

Sumber: Data Hasil Perhitungan SPSS versi 29

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode uji multikolinieritas dengan melihat nilai Tolerance dan VIF pada model regresi. Jika nilai VIF > 10 atau tolerance < 0,1, maka ada multikolinieritas dalam model regresi dan jika nilai VIF < 10 atau tolerance > 0,1, maka tidak ada multikolinieritas dalam model regresi. Hasil penelitian menggungkapkan bahwa niai VIF menunjukkan nilai untuk PAD dan Dana Perimbangan masing-masing sebesar 2,808 dan nilai tolerance dari masing-masing variabel sebesar 0,358.. Nilai VIF varaibel independen tersebut yaitu kurang dari 10 (2,808< 10) dan nilai tolerance lebih dari 0,1 (0,358 > 0,1). Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas dalam model regresi

c. Uji Autokolerasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokolerasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,460[a]	,212	,195	4,73395	1,828

a. Predictors: (Constant), BM, PAD

b. Dependent Variable: KK

Sumber: Data Hasil Perhitungan SPSS versi 29

Hasil uji autokorelasi menggunakan metode *Durbin-Watson* menghasilkan nilai 1,828. Karena nilai ini lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi, yaitu kondisi di mana terdapat hubungan antar residual (kesalahan) dari satu observasi dengan observasi lainnya. Namun, jika ada masalah autokorelasi yang tidak dapat diidentifikasi sepenuhnya melalui uji *Durbin-Watson*, uji tambahan seperti *run test* bisa digunakan sebagai solusi. Dengan demikian, setelah memastikan tidak ada masalah autokorelasi, analisis regresi linier dapat dilanjutkan dengan hasil yang lebih akurat dan valid.

d. Uji Heterokedastisitas

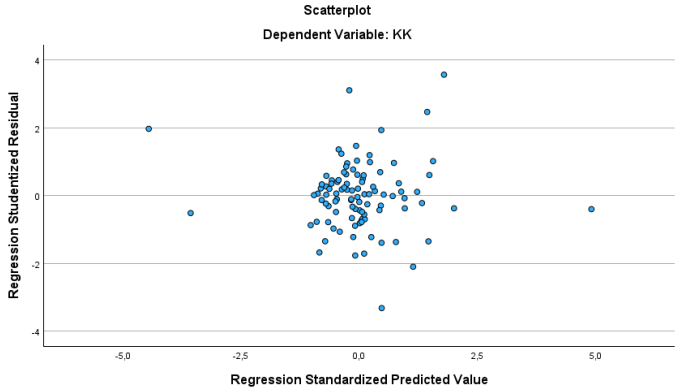

Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas
Sumber: Data Hasil Perhitungan SPSS versi 29

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan bahwa varians residual atau galat dari model regresi bersifat konstan, tidak berubah-ubah untuk semua nilai variabel independen. Jika terdapat ketidaksamaan varians residual, ini disebut sebagai heteroskedastisitas, yang dapat mengganggu validitas hasil regresi. Sebaliknya, model regresi yang baik adalah yang memenuhi kondisi homoskedastisitas, yaitu varians residualnya konstan (Ghozali, 2017).

Uji Koefisien dan Regresi

Uji koefisien dan regresi dilakukan menggunakan program SPSS yang meliputi: uji determinasi, uji F, dan uji T.

a. Uji Determinasi

Tabel 5. Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,460[a]	,212	,195	4,73395

a. Predictors: (Constant), BM, PAD
Sumber: Data Hasil Perhitungan SPSS versi 29

Berdasarkan hasil penelitian, model regresi menunjukkan nilai R sebesar 0,460. Nilai R ini mengindikasikan adanya korelasi yang cukup kuat antara variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi). Sementara itu, nilai R^2 sebesar 0,212 menunjukkan bahwa sekitar 21,2% variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam model. Sedangkan adjusted R^2 sebesar 0,195 menunjukkan penyesuaian terhadap R^2 yang memperhitungkan jumlah variabel dalam model, sehingga hasilnya adalah 19,5% dari variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model ini. Dengan demikian, sekitar 80,5% variasi masih dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang diteliti.

b. Uji F

Tabel 6. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	577,534	2	288,767	12,885	<,001[b]
	Residual	2151,385	96	22,410		
	Total	2728,920	98			

a. Dependent Variable: KK
b. Predictors: (Constant), BM, PAD
Sumber: Data Hasil Perhitungan SPSS versi 29

Dari data tersebut, nilai F hitung sebesar 0,001 menunjukkan hasil signifikan pada uji regresi. Dalam analisis regresi, nilai F hitung digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan secara keseluruhan memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai F hitung yang sangat kecil (0,001) ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan signifikan secara statistik, artinya ada hubungan yang nyata antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Ini berarti variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji T

Tabel 7. Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	97,227	,793		122,559	<,001
	PAD	-9,878E-12	,000	-,645	-4,248	<,001
	BM	2,280E-11	,000	,770	5,067	<,001

a. Dependent Variable: KK

Sumber: Data Hasil Perhitungan SPSS versi 29

Berdasarkan hasil uji signifikansi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Untuk PAD, nilai signifikansi sebesar 0,001 dengan t-hitung sebesar -4,248, menunjukkan bahwa karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,001 < 0,05), hipotesis alternatif (Ha) diterima. Ini berarti secara parsial, PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Meskipun t-hitung bernilai negatif, hal ini tidak mengurangi signifikansi pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan. Sementara itu, Belanja Modal juga memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 dengan t-hitung sebesar 5,067. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, hipotesis alternatif (Ha) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian, baik Pendapatan Asli Daerah maupun Belanja Modal terbukti memiliki pengaruh nyata terhadap kinerja keuangan secara parsial.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2020-2022, sedangkan belanja modal memiliki pengaruh negatif signifikan. Penelitian ini terbatas pada Provinsi Sumatera Utara dan hanya menggunakan dua variabel independen, sehingga tidak mencakup faktor lain yang memengaruhi kinerja keuangan. Pemerintah daerah disarankan untuk terus mengoptimalkan potensi PAD. Penelitian selanjutnya bisa memperluas objek penelitian ke wilayah lain dan menambah variabel independen seperti ukuran pemerintahan, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan transfer.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua dan saudara-saudara saya atas dukungan dan doa yang tak henti-hentinya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Semoga hasil ini menjadi langkah awal yang baik dalam perjalanan akademik saya. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Ardelia, I.K. 2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020), *JAA, 7*(1), 60-81.

Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R. D. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, *4*(1), 287–295.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, (2020). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia.* Diakses pada 16 Desember 2020, dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id/.

Febrianto, N. 2018. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Ukuran Legislatif, Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi DIY Tahun 2009-2016), *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta,*1-15

Ghozali, I. 2017. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Halim, A. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik,Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah).* Jakarta: Salemba Empat.

Padang, N.L., & Padang, W.S. 2023. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, *9*(2), 287-302

Pratiwi, T.Y. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012—2016, *Skripsi*,. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 12

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ratnasari, D., & Meirini, D. 2022. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Silpa Dalam Pengaruhnya Kinerja Keuangan, *Jurnal Akuntansi*, *32*(5), 38-47.

Saragih, F. 2020. *Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing.* Makalah ini disajikan dalam Seminar Of Social Sciences Engineering & Humaniora,

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.